

**KERJA SAMA KOMUNITAS ASEAN 2015
DALAM MENGHADAPI ATHG
(ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN DAN GANGUAN)**

ADI PRAYETNO
UNIVERSITAS TERBUKA
adiprayetno7@gmail.com

Abstrak

Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri menggunakan politik “Bebas-aktif”. Di mana Bebas yang artinya tidak memihak manapun dan Aktif yang artinya berinisiatif dalam upaya perdamaian dunia serta kesejahteraan umat manusia khususnya di Komunitas ASEAN. Dalam Politik bebas-aktif ini menghendaki Indonesia dapat menghadapi segenap ancaman dari dalam maupun luar dengan Hankamnya sendiri. Dalam hal ini keamanan Komunitas ASEAN atau negara tetangga juga dapat berimplikasi terhadap kesetabilan dalam negeri Indonesia. Tujuannya kajian ini untuk menjalin hubungan dan kerja sama dalam negara-negara Komunitas ASEAN serta negara-negara tetangga yang dengan baik. Prinsip ekonomis perlu diterapkan dalam usaha pertahanan keamanan,serta manajemen yang efektif dan efisien. Di samping itu kesiapan dan keefektifan dalam keadaan darurat harus terjamin. Ancaman yang dihadapi sekarang ini semakin lama semakin kompleks, dimana persenjataan dan perlengkapan lain semakin lama semakin rumit dan terperinci. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan harus bisa memanfaatkan saling tukar pikiran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Komunitas ASEAN ini. Kajian ini dari analisis sumber studi buku modul Pendidikan Kewarganegaraan (MKDU4111) Universitas Terbuka dan Internet. Dari analisis ini dalam menghadapi ATHG(Ancaman,Tantangan,Hambatan dan Ganguan) Indonesia perlu benah diri di segala sektor,karena sekarang masalah timbul semakin kompleks,seperti perkembangan dunia maya (internet) yang pesat,adanya jual beli manusia dan Narkoba. Dengan ini,hubungan yang sinergis antar anggota ASEAN sangat diperlukan dalam mewujudkan Kerja sama dan Keamanan antar anggota.

Kata kunci : Politik bebas-aktif, Komunitas ASEAN, Prinsip Ekonomi, ATHG

PENDAHULUAN :

Latar Belakang :

Secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II. Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerja sama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerja sama pembangunan kawasan. Salah satu capaian dan sumbangsih terpenting dari ASEAN adalah terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi negara-negara

ASEAN terus mengalami peningkatan. Selama empat dekade keberadaannya, ASEAN telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan positif dan signifikan yang mengarah pada pendewasaan ASEAN. Kerja sama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan akan dibentuknya Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2015 yang dipicu pula oleh munculnya isu-isu dan peristiwa global seperti masalah terorisme, lingkungan hidup, meningkatnya situasi persaingan dan ketegangan di antara negara-negara besar di kawasan, isu persenjataan nuklir dan sebagainya.

ASEAN sebagai suatu satuan komunitas yang berpandangan maju ke depan, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli.

Sejak berdirinya ASEAN, organisasi ini telah memutuskan untuk bekerja sama secara komprehensif di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam perkembangannya, kerja sama ASEAN lebih banyak dilakukan di bidang ekonomi, sementara kerja sama di bidang politik-keamanan masih belum maksimal akibat adanya persepsi ancaman yang berbeda-beda dan penerapan prinsip-prinsip *non-interference* serta *sovereign equality* oleh negara-negara anggota ASEAN.

Komunitas Keamanan ASEAN merupakan sebuah pilar yang fundamental dari komitmen ASEAN dalam mewujudkan Komunitas ASEAN. Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN akan memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai. Terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan akan menjadi modal bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat ASEAN.

Komunitas Keamanan ASEAN menganut prinsip keamanan komprehensif yang mengakui saling keterkaitan antar aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Komunitas Keamanan ASEAN memberikan mekanisme pencegahan dan penanganan konflik secara damai. Hal ini dilakukan antara lain melalui konsultasi bersama untuk membahas masalah-masalah politik-keamanan kawasan seperti keamanan maritim, perluasan kerja sama pertahanan, serta masalah-masalah keamanan non-tradisional (kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain). Dengan derajat kematangan yang ada, ASEAN diharapkan tidak lagi menyembunyikan masalah-masalah dalam negeri yang berdampak pada stabilitas kawasan dengan berlindung pada prinsip-prinsip *non-interference*.

Indonesia mengusung politik bebas aktif sebagai konsep politik luar negerinya. Gagasan politik bebas aktif dicetuskan oleh Wakil Presiden RI yang pertama Drs. Moh. Hatta dihadapkan BPKNIP 2 September 1948. Selanjutnya di dalam Garis–garis Besar Haluan Negara disebutkan “Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera”. Selain itu sebagai salah satu Warga Negara yang baik, sudah sepatutnya kita untuk ikut serta di dalam upaya Bela Negara dengan mewaspadaikan dan mengatasi berbagai macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap NKRI, seperti halnya para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan tersebut dapat datang dari mana saja, seperti contohnya dari luar negeri atau bahkan dari dalam negeri sekalipun.

Rumusan masalah :

1. Bagaimana tantangan dan Peluang yang dihadapi Indonesia Menuju ASEAN Community 2015 di bidang keamanan?
2. Apa saja Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dalam ASEAN Community dan bagaimana cara menghadapinya?

KERANGKA TEORI/KONSEP:

1. Konsep Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif” Dalam Menghadapi Realitas
2. Peluang dan hambatan ASEAN *Comunity* di bidang keamanan
3. Menghadapi ATHG dalam ASEAN *Coumunity*

PEMBAHASAN:

Konsep Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif” Dalam Menghadapi Realitas

Negara mempunyai hak untuk menentukan nasib negaranya sendiri. Hal itu pun telah dikemukakan dalam pembukaan UUD tahun 1945. Negara mempunyai hak penuh membentuk kebijakan serta membuat keputusan atas dasar kesejahteraan rakyatnya. Negara sama dengan manusia dalam prakteknya. Tidak dapat hidup dan berdiri sendiri. Akan saling bergantung dan membutuhkan bantuan dengan satu sama lainnya. Indonesia telah dibagi menjadi beberapa bagian fokus yang harus ditangani serta diawasi pemerintah segala aktivitasnya, termasuk interaksi dengan negara lain. Negara mempunyai hak penuh menentukan kebijakan luar negerinya atas dasar kesejahteraan masyarakat serta kebebasan rakyatnya. Indonesia mengusung politik bebas aktif sebagai konsep politik luar negerinya. Gagasan politik bebas aktif dicetuskan oleh Wakil Presiden RI yang pertama Drs. Moh. Hatta dihadapkan BPKNIP 2 September 1948. Selanjutnya di dalam Garis–garis Besar Haluan Negara disebutkan “Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera”.

Usungan politik bebas aktif sangat selaras berdasarkan pembukaan UUD 1945 yang dikutip sebagai berikut “Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas” dan “ ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dalam kutipan pembukaan UUD tersebut menyatakan bahwa Indonesia ingin menjadi salah satu peran penting dalam pembentukan kedamaian yang menjadi cita-cita bersama.

Tercetusnya konsep politik bebas aktif sangat perngaruh dari sejarah besar yang pernah terjadi, Perang Dunia II. Pasca perang dunia II kekuatan negara terbagi menjadi 2 bagian, Blok Timur dan Blok Barat. Blok Timur dengan kekuatan besar dari China, sedang Blok Barat kekuatan terbesar pada Amerika. Kedua negara ini mempunyai ideologi yang berbeda. Mempengaruhi ideologi serta kebijakan negara lain, merupakan salah satu tujuan kedua besar negara ini. Indonesia yang dengan tegas menolak adanya pemihakan pada kedua belah pihak Timur dan Barat. Berdasarkan ideologi yang Indonesia anut, demokrasi Pancasila yang paling cocok bagi bangsa Indonesia dengan berbagai pertimbangan.

Bebas dapat diartikan non-kolonialisme, tidak memihak kubu manapun serta tidak menganut ideologi negara-negara adikuasa. Bebas juga berarti tidak ikut campur dalam persekutuan-persekutuan yang telah dibentuk. Indonesia bebas melakukan aktivitas politik dengan blok Timur dan Blok Barat tanpa adanya pemihakan manapun. Aktif berarti Indonesia menjadi negara yang aktif dalam membangun perdamaian dunia, menjunjung tinggi kemerdekaan serta kebebasan negara.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tidak hanya dijadikan sebagai konsep saja, melainkan juga sebagai strategi politik luar negeri dalam mencapai kepentingan negara. Indonesia dengan bebas dapat menjalin kerja sama, terutama dalam bidang ekonomi. Kerja sama yang bebas ini dapat membantu peningkatan ekonomi di Indonesia. Indonesia juga dengan mudah dapat berteman dan menjalin hubungan diplomasi dengan negara mana saja. Pasar Indonesia dapat dimasuki dari berbagai asal investor, yang dapat memacu perkembangan ekonomi Indonesia. Kerja sama yang dilakukan tidak hanya sebatas ekonomi saja, namun diberbagai bidang.

Dewasa ini pada dasarnya politik luar negeri RI tidak mengalami perubahan, yaitu tetap politik luar negeri bebas aktif yang berdasarkan pada UUD 1945. Arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, dengan telah disahkannya Undang-undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, maka Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri RI selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan termasuk dalam UU tersebut.

Menurut pendapat penulis, pengusungan konsep politik luar negeri bebas aktif yang saat ini diterapkan sudah cukup relevan dengan politik global kekinian. Seperti yang telah dibahas sedikit diatas bahwa ketentuan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain telah diatur

dalam undang–undang. Begitu pun juga bahasan tentang perjanjian internasional. Dalam kehidupan nyatanya, Indonesia telah banyak menjalin kerja sama dengan berbagai negara. Yang mana tentu saja kerja sama dibentuk atas kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi Indonesia. Indonesia tidak memihak manapun dan tetap menjalin interaksi dengan negara manapun. Terlihat dengan berbagai fakta, Indonesia telah banyak menandatangani perjanjian Internasional. Entah dalam bentuk ekonomi, ataupun kerja sama lainnya. Dilansir oleh Voa Indonesia, bahwa Indonesia dengan Pakistan telah menandatangani perjanjian anti terorisme dalam bentuk MOU. Dengan banyaknya beredar issue terorisme, sedikit banyak Indonesia dan Pakistan menjadi salah satu perbincangan karena pernah dianggap mempunyai kelompok terorisme dalam negara. Sebab itu keduanya perlu memerangi ancaman tersebut secara bersama lewat kerja sama intelejen (11/25). Baru–baru ini juga pemerintah daerah Kalimantan membuat kerja sama dengan Russia. Awang Faroek, Gubernur Kal–Tim, menandatangani MOU dengan RZD (Russian Railways). Beberapa perjanjian yang telah diungkapkan di atas, bagi penulis merupakan implementasi yang cukup bagi pelaksanaan makan bebas. Dalam militer, Indonesia bekerja sama dengan Amerika. Dalam ekonomi, Indonesia sangat banyak bekerja sama dan bergantung pada China. Pada sektor impor Indonesia banyak bekerja sama seperti beras dengan Thailand, daging dengan Australia, teknologi dengan Jepang, dan beberapa sarana transportasi bekerja sama dengan Russia, Amerika, Jepang dan lain sebagainya. Indonesia bisa menjalin kerja sama secara bebas dengan negara maju, berkembang, komunis, demokrasi, semua negara dalam berbagai tipe.

Dalam perealisasi makna aktif tidak sedikit yang telah dilakukan oleh Indonesia. Contoh kecil adalah Indonesia sebagai salah satu negara penggerak berdirinya ASEAN. Institusi regional ini mempunyai peran besar dalam regional. Menjunjung tinggi kedaulatan negara, kedamaian dunia, stabilisasi ekonomi, kerja sama dalam berbagai bidang, menjaga keamanan regional dan sebagainya. ASEAN sudah berdiri lama dan sampai saat ini masih berjalan dengan masig sangat efektif. Dengan berdirinya ASEAN, kestabilan keamanan regional lebih terjaga serta keamanan regional dapat berlangsung dengan lancar. Kerja sama antar negara regional dapat terjamin kelangsungannya. ASEAN yang merupakan salah satu institusi regional yang paling stabil dan pula dapat terlihat hasil nyata kerja sama antar negaranya. Masuknya Indonesia sebagai anggota PBB merupakan salah satu wujud ikut sertanya Indonesia dalam perdamaian serta ketertiban dunia. Indonesia juga telah beberapa kali mengirimkan pasukan Garuda (pasukan perdamaian Indonesia) di bawah bendera PBB dalam permasalahan keamanan serta mewujudkan perdamaian di daerah–daerah perang seperti di Timur Tengah, Vietnam, dan Kamboja. Demi menjunjung tinggi HAM dan atas nama kemanusiaan, Indonesia juga mengirim beberapa relawan serta bantuan pada Palestina.

Seiring dengan kemajuan zaman, dewasa ini kita telah banyak dipengaruhi oleh globalisasi. Globalisasi mendorong masyarakat untuk berpikir lebih cepat dan semakin cerdas. Dengan begitu diperlukan adanya peran diplomat sebagai wakil negara. Adanya penempatan diplomat, diharapkan banyak membantu kerja sama antar negara menjadi lebih mudah dan lancar. Seorang diplomat sebagai representatif negara juga diharapkan dapat menyelesaikan

beberapa masalah warga negara Indonesia yang mengalami kesulitan ataupun sebuah kasus di negara lain. Diplomat diutus untuk menjaga stabilisasi kerja sama serta interaksi negara yang saling bersangkutan. Para diplomat yang mempunyai skill khusus dalam berdiplomasi menjadikan kedua belah pihak negara semakin intens dan erat, ditambah pula dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan RJPM Nasional sasaran politik luar negeri Indonesia pada tahun 2004–2009 yang hendak dicapai sebagaimana digariskan Departemen Luar Negeri RI, yakni: “Meningkatkan peran Indonesia dalam hubungan internasional [untuk] menciptakan perdamaian dunia, pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan internasional, serta mendorong terciptanya tatanan dan kerja sama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik demi mendukung pembangunan nasional. Sedangkan salah satu arah kebijakan dari politik luar negeri Indonesia adalah meningkatnya kualitas diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional termasuk penyelesaian masalah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia di luar negeri. Namun terdapat juga banyak tantangan yang harus dihadapi selain banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh.

Sejalan dengan krisis ekonomi yang menimpa Indonesia, maka dari segi ekonomi upaya–upaya diplomasi Indonesia diarahkan pada usaha memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang timbul dari arus globalisasi untuk meningkatkan ekspor non–migas; mengupayakan meningkatnya arus investasi asing dan kerja sama keuangan; serta mengembangkan kerja sama teknik dan jasa ekonomi dalam mendukung upaya pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Pelaksanaannya telah dilakukan secara sinergis melalui pendekatan global, regional, intra–regional, dan bilateral. Dari segi politik, Indonesia tetap perlu menjalankan politik luar negeri yang rasional dan moderat dengan mengandalkan prinsip–prinsip kerja sama internasional, saling menghormati kedaulatan nasional, dan non–*interference*. Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pra orde baru yang cukup menghantam keras perekonomian Indonesia. Politik bebas aktif saat itu menjadi salah satu alternative jalan keluar yang mana Indonesia mendapat banyak bantuan dari berbagai negara yang merupakan relasi Indonesia dalam bekerja sama. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan dapat bekerja sama membentuk interaksi satu sama lain menjadikan Indonesia memiliki banyak relasi yang dapat membantu saat terjadi krisis ekonomi seperti ini. Indonesia juga harus berpendirian kuat memegang konsep yang telah diterapkan sekian lama. Pengaruh Barat semakin kuat, begitu pula pengaruh Timur yang semakin meningkatkan serta menunjukkan *capability* mereka di dunia internasional. Demi mencapai mendapatkan kepentingan negara Indonesia dan demi menciptakan keadaan masyarakat yang sejahtera, Indonesia harus tetap pada konsep yang dirasa sangat menguntungkan dan cocok bagi negara kita.

Adapun sedikit kalimat berupa kritikan yang akan disampaikan penulis terhadap konsep politik bebas aktif. Pada orde lama, konsep bebas aktif telah diterapkan, namun pada kenyataannya pemimpin kita saat itu (Soekarno) lebih memihak ke arah Timur, komunisme. Ia menentang keras adanya campur tangan serta pengaruh barat bahkan menolak keras kolonialisme, serta neo-kolonialise. Hal ini berbanding jauh sekali dengan konsep yang ada.

Tidak adanya implementasi secara nyata dalam pemaknaan kata bebas, berdiri sendiri dengan tetap menjunjung ideologi pribadi, dan tidak memihak kubu manapun. Ditandai dengan perubahan kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, terdapat juga di dalamnya perubahan kebijakan politik. Soeharto mempunyai visi, misi, dan cara kepemimpinan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Politik bebas aktif masih tetap menjadi tombak penting dalam politik luar negeri. Perubahan dalam sistem politik Indonesia menimbulkan suatu kesesuaian politik yang justru tidak ada ketika ASA dibentuk pada tahun 1961. Walaupun Indonesia menegaskan kembali secara formal prinsip-prinsip kebijaksanaan luar negeri yang didasarkan pada pencegahan asosiasi yang bersifat aliansi atau memberikan fasilitator bagi pangkalan militer asing di bawah pimpinan Jendral Soeharto, Indonesia telah bergabung dalam jaringan informal negara-negara yang berpandangan serupa yang menentang Asia Tenggara dan di luarnya, yang di dalamnya Muangthai, Malaysia, Singapura, dan Filipina sudah menjadi anggota.

Namun jika dilihat keadaan saat ini memang sudah seperti dulu lagi. Saat ini Indonesia menurut penulis dalam keadaan netral, tidak memihak manapun. Semua dijadikan kawan. Walaupun dirasa penulis terkadang Indonesia terkesan plin plan dan sedikit memihak pihak-pihak tertentu.

APA ITU ATHG?

Ancaman

Ancaman merupakan salah satu bentuk usaha yang bersifat untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui segala tindak kriminal dan politis. *Ancaman Militer* ini sendiri merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi dan dinilai memiliki kemampuan yang berbahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara :

1. Dari Luar Negeri
 - a. Agresi
 - b. Pelanggaran Wilayah oleh Negara Lain
 - c. Spionase/Mata-mata
 - d. Sabotase
 - e. Aksi teror dari Jaringan Internasional
2. Dari Dalam Negeri
 - a. Pemberontakan bersenjata
 - b. Konflik horizontal
 - c. Aksi teror
 - d. Sabotase
 - e. Aksi kekerasan berbaur SARA
 - f. Gerakan separatis
 - g. Perusakan lingkungan

Ancaman Nonmiliter merupakan ancaman yang tidak bersenjata akan tetapi apabila tetap dibiarkan, akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Tantangan

Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan.

Hambatan

Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional.

Gangguan

Gangguan merupakan hal atau usaha yang muncul dari luar yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak terarah.

Tantangan dan peluang Indonesia dalam pembentukan ASEAN Community 2015

Ñ Tantangan indonesia dalam pembentukan ASEAN Community 2015

1. Tantangan Internal
 - a. Lemahnya koordinasi antara anggota ASEAN, hal ini disebabkan antara lain oleh *vested interest* dari beberapa negara anggota yang lebih mengemuka dibanding dengan *we feeling* yang selama ini dikembangkan oleh ASEAN;
 - b. Menjamurnya pertemuan-pertemuan dan lembaga-lembaga baru dalam tubuh ASEAN sehingga akhirnya tidak bermuara di suatu titik temu. Bahkan sering kali dalam KTT/pertemuan ASEAN lainnya tidak berhasil disepakati suatu keputusan yang telah dibahas dalam pertemuan pada *level-level* yang lebih rendah;
 - c. Adanya kesenjangan pembangunan serta sumber daya manusia di antara anggota ASEAN, kondisi ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja organisasi regional secara keseluruhan, khususnya dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam pertemuan-pertemuan ASEAN.
2. Tantangan eksternal
 - a. Bentuk-bentuk kejahatan baru yang sifatnya non-tradisional antara lain: perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia, penyelundupan narkoba dan obat terlarang, bajak laut, kejahatan ekonomi internasional dan kejahatan melalui internet dimana kejahatan-kejahatan tersebut bersifat lintas batas negara.
 - b. Dampak globalisasi
Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, dunia mengalami begitu banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, perubahan tersebut menuntut ASEAN agar

menyikapi secara cermat, cepat dan tepat yang meliputi isu-isu global seperti degradasi lingkungan, penyelundupan senjata, pengungsi, terorisme, penyelundupan manusia dan sebagainya.

c. Terorisme

Pada saat ini hampir tidak ada satu kawasan yang bebas dari ancaman terorisme yang menjadi ancaman global yang bergerak didukung jaringan kerja sama diantara berbagai kelompok terror, baik dalam organisasi, operasi, dukungan keuangan, maupun idealisme.

Ñ **Peluang Indonesia dalam pembentukan ASEAN Community 2015**

Perjalanan ke arah integrasi ASEAN di bidang ekonomi berlangsung relatif lebih cepat dibandingkan kerangka kerja sama politik, keamanan, maupun sosial budaya. Mandat keputusan Bali Concord II pada tahun 2003 dalam bangunan ASEAN Economic Community itu pun jelas mengarahkan kepada terbentuknya sebuah integrasi ekonomi. Komitmen ini diikuti langkah membentuk mekanisme guna mempercepat akselerasi integrasi ekonomi bagi sektor-sektor prioritas. Memberikan dorongan dan promosi pada perusahaan-perusahaan agar menolak merelokasi usahanya di dalam wilayah ASEAN. Dalam hal ini, termasuk mendorong kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan antara usaha sektor dengan publik. ASEAN akan membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN ketika integrasi ekonomi yang sedang dilaksanakan saat ini telah mampu menciptakan kawasan perekonomian yang stabil, sejahtera dan memiliki daya saing yang kuat di dunia.

Ñ **Tantangan dan peluang Indonesia dalam pembentukan ASEAN Community 2015 di bidang keamanan.**

Tantangan Indonesia dalam pembentukan ASEAN Community 2015 di bidang keamanan.

a. Perlindungan Hak Azasi Manusia

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) ASEAN telah membentuk Komisi Hak Azasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN pada KTT ASEAN ke-15 di Cha-Am Hua-Hin, Thailand pada 23 Oktober 2009, ini merupakan sebuah badan konsultatif antar-Pemerintah ASEAN dan menjadi bagian integral dalam struktur Organisasi ASEAN dan lembaga ini merupakan lembaga HAM di ASEAN yang bersifat menyeluruh dan bertanggung jawab.

b. Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunai Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Vietnam. Di beberapa bagian terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara *claimant states* (Brunai Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Vietnam) yang menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi.

Ñ **Peluang Indonesia dalam pembentukan ASEAN Community 2015 di bidang keamanan**

1. **Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara**
Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Traktat ini ditandatangani pada KTT ASEAN di Bangkok pada 15 Desember 1995.
2. **Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral**
Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral merupakan kerangka perdamaian dan kerja sama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara tetapi juga mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar dalam bentuk serangkaian tindak pengekangan diri secara sukarela.

PENUTUP:

Kesimpulan:

Dalam keadaan saat ini memang sudah seperti dulu lagi. Saat ini Indonesia menurut penulis dalam keadaan netral, tidak memihak manapun. Semua dijadikan kawan. Walaupun dirasa penulis terkadang Indonesia terkesan plin plan dan sedikit memihak pihak-pihak tertentu. Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) pastilah ada dalam menjalankan kerja sama dalam komunitas ASEAN. Untuk itu menurut penulis menghimbau segala elemen bangsa untuk ikut serta dalam menanggulangi bahaya ATHG ini. Peluang dan tantangan dalam mengikuti komunitas ASEAN ini harus kita lihat jeli untuk mencegah adanya sistem kerja sama yang tidak sehat.

Pesan penulis:

Penulis sadar bahwa makalah ini belum sempurna dan banyak hambatan dalam penulisan. tapi semangat penulis dalam mengikuti seminar sangat tinggi demi ikut serta menyumbangkan pikiran untuk bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Ittihad Amin, Zainul. Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Universitas Terbuka

Website

<http://www.habibullahurl.com/2015/05/pengertian-ancaman-tantangan-hambatan-gangguan.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_2020_ASEAN

https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kebijakan_penghapusan#Artikel_yang_tidak_dikembangkan